KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Lobi Paripurna RUU Pemilu Berjalan Alot
Tanggal : Jumat, 21 Juli 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1 & 9

Lobi Paripurna RUU Pemilu Berjalan Alot

● AMRI AMRULLAH, FAUZIAH MURSID

JAKARTA – Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pengambilan keputusan atas lima isu krusial dalam RUU Pemilu berjalan alot. Sampai dengan berita ini diturunkan, Kamis (20/1) pukul 22.00 WIB, fraksi-fraksi di DPR masih belum menemui titik temu perihal isu ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) maupun konversi suara menjadi kursi di parlemen. Mereka terus melakukan lobi politik.

Rapat Paripurna DPR berlangsung di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Berdasarkan pantauan *Republika* pada Kamis menjelang siang, ruang sidang paripurna penuh sesak oleh anggota DPR. Menurut catatan, sampai dengan pukul 11.00 WIB, diketahui ada 528 anggota DPR dari total 560 anggota DPR yang hadir.

Perinciannya sebanyak 106 anggota dari Fraksi PDIP, Golkar 84 anggota, Nasdem 35 anggota, PPP 35 orang, Hanura 15 orang, PAN 41 anggota, PKB 45 anggota, Gerindra 71 anggota, PKS 39 anggota, dan Demokrat 53 anggota. Sejak dibuka pada pukul 11.00 WIB, rapat paripurna yang berlangsung selama tiga jam sejak pukul 11.00 WIB menyajikan kecenderungan berbeda 10 fraksi di DPR terkait isu *presidential threshold* dalam RUU Pemilu. Hal ini tergambar saat perwakilan masing-masing fraksi memberi pandangan secara resmi.

Pandangan resmi fraksi dilakukan berurutan dimulai dari Fraksi PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Dari yang tampak dalam pandangan, kelima fraksi yang pada pandangan minifraksi rapat panitia khusus RUU Pemilu pada Kamis (13/7) sepakat Paket A yang berisi *presidential threshold* 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara

Bersambung ke hlm 9 kol 1-3

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Lobi Paripurna RUU Pemilu Berjalan Alot ..... dari hlm 1

sah nasional, konsisten dalam pandangan fraksi Rapat Paripurna DPR.

Diawali oleh Fraksi PDIP yang secara mantap meminta agar forum rapat paripurna segera memutus untuk pengambilan keputusan melalui *voting*. "Kami PDIP meminta segera ambil keputusan dalam rapat paripurna," ujar Bendahara Fraksi PDIP Alex Indra Lukman pada saat memberikan pandangan Fraksi PDIP di Ruangan Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

Hal sama juga ditegaskan Fraksi Partai Golkar yang diwakili Rambe Kamarul Zaman. Ia meminta agar tidak dilakukan lobi-lobi panjang terhadap lima isu krusial. Sebab, pembahasan dan perdebatan panjang isu krusial telah dilakukan dalam Pansus Pemilu selama ini. "Kita sudah pagi ke pagi, kalau mau coba mufakat lagi. Tapi jangan lama-lama. Substansi sudah sangat dalam," ujar Rambe.

Begitu halnya suara Fraksi PPP yang diwakili oleh Ahmad Baidowi, Partai Nasdem Johny G Plate, dan Partai Hanura yang diwakili Nurdin Tampubolon bahwa partainya konsisten memilih opsi A.

Sementara, Fraksi PAN dan PKB yang diketahui belum memastikan pilihannya paket menghendaki agar dilakukan lobi-lobi terlebih dahulu. Sedangkan trio Gerindra, PKS, dan Demokrat solid meniadakan *presidential threshold*.

Dinamika mulai tergambar setelah lobi dilakukan antara Kapoksi masing-masing fraksi dan pimpinan DPR. Empat fraksi, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, serta PAN menghendaki pengambilan keputusan lima isu krusial RUU Pemilu kembali ditunda hingga Senin (24/7) mendatang.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengungkapkan, fraksi-fraksi yang meminta penundaan itu lantaran ingin kembali melaporkan kepada para petinggi partai politik masing-masing. Namun, fraksi-fraksi lainnya menghendaki pengambilan keputusan dilakukan Kamis (20/7) melalui mekanisme *voting*. "Tapi *kan* ini sudah lama *lah*. Jadi, ini *kan* lagu lama. Kita mau sekarang," ujar Dadang.

Hal ini, kata Dadang, karena sesuai kesepakatan jika tidak ditemui kesepakatan dalam lobi-lobi tersebut, mau tidak mau mengambil opsi *voting*. Sementara dalam forum lobi, konfigurasi peta fraksi masih sama antara kubu pendukung *presidential threshold* 20-25 persen, nol persen, dan opsi jalan tengah 10-15 persen.

Dadang juga memastikan ada enam fraksi yang mendukung Paket A yang berisi *presidential threshold* 20-25 persen dari semula hanya lima, yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, dan PPP, bertambah PKB. Sementara, PAN masih tetap dalam posisinya di opsi jalan tengah 10-15 persen.

Ingin menunda

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mengungkapkan belum juga bergesernya sikap PAN lantaran fraksinya lebih menitikberatkan pada isu metode konversi suara kuota hare. Diketahui Paket A pilihan koalisi pendukung pemerintah berisi metode sainta lague murni. "Kami sebenarnya kuota hare jadi ikon kami. Makanya kami sempat usulkan bisa *nggak* di paket A kuota hare. Tapi mereka tolak karena sudah paket," ujar Yandri.

Dia beralasan, hal ini karena kursi DPR, DPRD, hingga tingkat kabupaten/kota dari PAN akan berkurang jika menggunakan metode konversi metode sainta lague murni. Hal ini juga akan berimbas ke beberapa partai lainnya. Dengan demikian, dengan mengesampingkan koalisi partai pemerintah, kecenderungan Fraksi PAN justru merapat ke pilihan paket B bersama Gerindra, Demokrat, dan PKS.

Yandri juga mengungkap kemungkinan opsi penundaan sebagaimana yang berkembang di lobi rapat paripurna. Hal ini karena sejumlah fraksi masih menginginkan musyawarah mufakat tercapai. "Karena mufakat jauh lebih sehat sebetulnya. Jadi bisa hari ini, bisa ditunda. Pansus RUU Pemilu juga dari April molor *sampe* akhir Juli kan," ujarnya.

Ditemui di sela-sela skors rapat paripurna, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap pengambilan keputusan lima isu krusial dalam RUU Pemilu tidak ditunda lagi. Harapan Tjahjo menyusul adanya permintaan empat fraksi, yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN untuk menunda pengambilan keputusan menjadi Senin (24/7) mendatang. "Seyogianya jangan ditunda ya," ujarnya.

Politikus senior PDIP ini mengaku menghargai sikap-sikap fraksi yang dalam pembahasan forum lobi tak kunjung menemui titik temu.

Namun, dia meyakini fraksi-fraksi DPR dapat bersikap arif terhadap pengambilan keputusan RUU Pemilu. "Ini UU harus diselesaikan. Soal masih bersikukuh hargai saja. Itu sah-sah saja. Semoga malam ini selesai," kata Tjahjo.

Menurut dia, sikap pemerintah pun masih sama, yaitu menghendaki agar *presidential threshold* 20-25 persen. Untuk itu, Tjahjo berharap putusan rapat paripurna juga sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. ■ **ed:** muhammad iqbal